

Kebijakan pajak pertambahan nilai atas penyerahan uang logam tidak layak edar oleh Bank Indonesia = Value added tax policy of non orbit coin money supplies on Bank of Indonesia

Anissa Pramudita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385774&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyerahan ULTLE yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai awal mulanya merupakan uang yang merupakan bukan barang kena pajak dan pengukuhan BI sebagai PKP disebabkan BI melakukan penyerahan ULTLE.

Tujuan penelitian ini menjelaskan serta menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan ULTLE ditinjau dari konsep PPN dan menjelaskan serta menganalisis pengukuhan BI sebagai PKP ditinjau dari konsep Taxable Person. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan ULTLE tidak sesuai dengan teori PPN dalam indikator value added tetapi sesuai dengan indikator taxable supply dan taxable goods, Bank Indonesia dikukuhkan menjadi PKP disebabkan melakukan penyerahan terutang PPN atas ULTLE.

Non Orbit Coin Money Supplies imposed on VAT basically is from money, and money is not imposed by VAT because money is not a taxable goods meanwhile BI is registered as a Taxable Person because BI did Non Orbit Money Coin supplies.

The purpose of this research first is to explain and analyze VAT imposed on Non Orbit Coin Money supplies, second to explain and analyze the reason BI registered as a taxable person. This research was conducted by a quantitative approach, qualitative analytic technic, cross-sectional study with literature review and depth interview.

The first result shows that Non Orbit Coin Money supplies is not suitably match with the principle VAT in the value added but suitably match with taxable supply and taxable goods indicator, second BI registered as a Taxable Person due supplies of Non Orbit Coin Money.